Militer dan Ruang Sipil dalam Krisis Demokrasi

Jaleswari Pramodhawardani
Kepala LAB 45

10 Desember 2025

Argumen Utama & Permasalahan

LAB 45

Premis: Instabilitas politik sering memicu peningkatan keterlibatan militer dalam ranah sipil



Dampak Negatif: Perluasan peran ini berpotensi mengikis fondasi ruang sipil, melemahkan institusi demokrasi, dan menghambat konsolidasi demokrasi jangka panjang.

- Mengikis fondasi ruang sipil
- Melemahkan institusi demokrasi
- Menghambat konsolidasi demokrasi jangka panjang

Konteks Global: Demokrasi dunia sedang menghadapi kemunduran (erosi normatif dan polarisasi), di mana militer sering ditarik untuk "menyelamatkan" situasi namun justru memperburuk supremasi sipil



Demokrasi Sedang Menghadapi Kemunduran
(Erosi Normatif dan Polarisasi)

Militer sering **ditarik** untuk **"menyelamatkan" situasi** namun justru **memperburuk supremasi sipil**



Kerangka Teori (Lensa Analisis)

LAB 45

Kontrol Sipil-Militer (Huntington & Feaver)



Kontrol Objektif
(Profesional/Apolitis)

Kontrol Subjektif
(Terintegrasi Politik/
Loyalitas Personal)

Krisis Demokrasi (Levitsky & Ziblatt)



Erosi perlahan norma demokrasi dan pelemahan institusi sipil dari dalam.

Sekuritisasi (Copenhagen School)



Isu-isu sipil sengaja 'disekuritisasi' (dianggap ancaman eksistensial) untuk membenarkan intervensi militer.

Kekuasaan Disipliner (Foucault)



Militerisasi bekerja secara halus melalui **pendisiplinan sosial** dan normalisasi kepatuhan di ruang sipil.

Fenomena Global (Studi Komparatif)

LAB 45

Pergeseran "Taktik"



Bukan lagi pelaku kudeta, melainkan "kaki tangan" eksekutif populis untuk mengamankan kekuasaan.

Kasus Venezuela (Maduro)



Strategi *Fused Function* (fungsi rangkap), di mana militer menduduki jabatan sipil, manajer BUMN, hingga bisnis untuk mengamankan loyalitas politik.

Kasus Filipina (Duterte)



Militerisasi birokrasi dan kabinet (mantan jenderal mengurus lingkungan & kesejahteraan) karena militer dianggap lebih efisien dan patuh dibanding sipil.

Evolusi Peran Militer di Indonesia

LAB 45



Dwifungsi (Orde Baru)

Militer memiliki peran ganda (pertahanan & sosial-politik) yang melembaga.



Reformasi (1999-2023)

Paradigma Baru, peran sosial-politik menjadi pasif, namun struktur teritorial tetap ada.



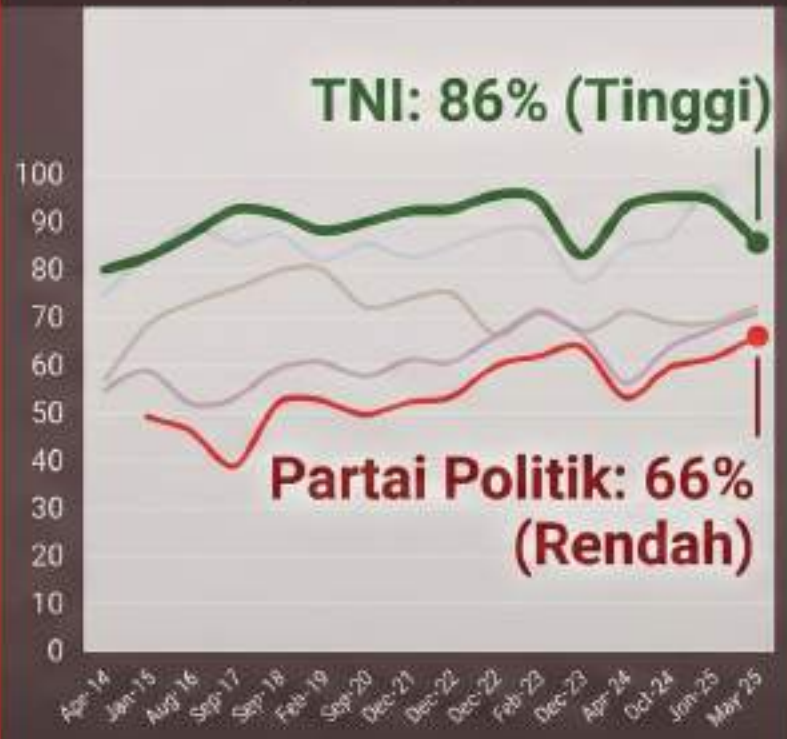
Menuju "Multifungsi"

- Militer aktif di bidang pertahanan.
- Semi-aktif di fungsi sosial (melalui 16 OMSP).
- Menduduki 14 instansi sipil (revisi UU).

Mengapa Militer Kembali Menguat?

LAB 45

Faktor Kepercayaan Publik



Survei Indikator (2025): Kepercayaan terhadap TNI jauh lebih tinggi.

Narasi "Penyelamat"



Sipil: Korup & Lambat

Militer: Disiplin & Efisien

Kebutuhan Eksekutif



Presiden (seperti Jokowi & Prabowo) membutuhkan legitimasi dan efektifitas institusi militer untuk mengeksekusi program populis.

Regulasi Baru dan Implementasi Militerisasi Sipil

LAB 45

1. EKSPANSI REGULASI & STRUKTUR
(Revisi UU No. 3/2025)

Pelebaran OMSP



- TNI kini berwenang menangani ancaman **siber** dan perlindungan WNI.

↓

- Pelaksanaannya **tidak** lagi memerlukan keputusan politik negara (keputusan Presiden tanpa persetujuan DPR).

Penambahan Komando Teritorial



- Rencana 22 Kodam baru, dengan 5 Kodam ditargetkan berdiri pada 2025 (Papua Selatan, Sulteng, Kalteng, Riau, Lampung) guna memperkuat cengkeraman hingga level tapak.

2.A. IMPLEMENTASI DI RANAH SIPIL
(Program Populis & Birokrasi)

Ketahanan Pangan



- Pembentukan "**Batalyon Penyangga**" yang memiliki fungsi ganda (tempur & pertanian) untuk program cetak sawah dan pompanisasi.

Militerisasi Birokrasi



- Perwira aktif kini dapat menduduki 14 instansi sipil, mengubah budaya kerja birokrasi dari deliberatif (diskusi) menjadi komando (kepatuhan).

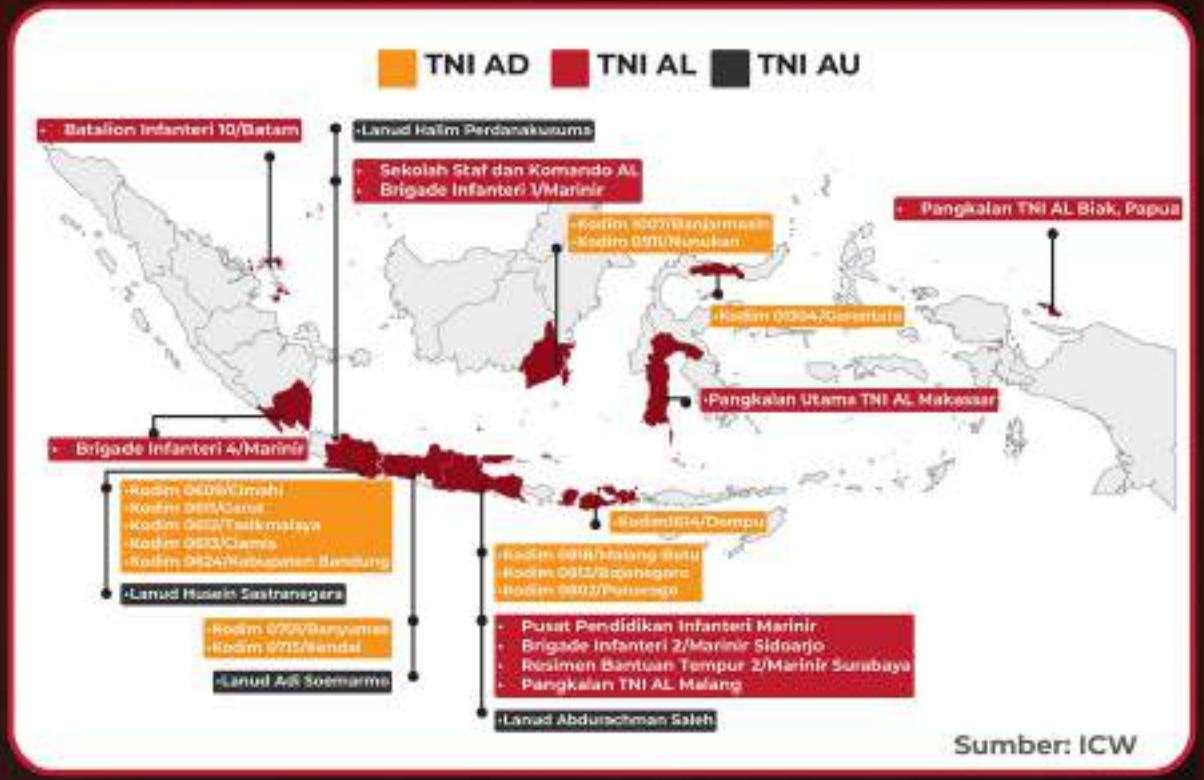
Regulasi Baru dan Implementasi Militerisasi Sipil

LAB 45

2.B. IMPLEMENTASI DI RANAH SIPIL (Program Populis & Birokrasi)



- **Makan Bergizi Gratis (MBG)**
  Pelibatan TNI dalam **logistik** dan dapur umum, yang sebarannya justru banyak di kota besar/padat penduduk, bukan hanya daerah terisolir.



Implikasi Kritis & Rekomendasi Solusi

LAB 45

A. Implikasi & Risiko (Warning)



Kekosongan Kapasitas Sipil

Pelemahan Supremasi Sipil: Ketergantungan pada militer mematikan kemandirian birokrasi dan menciptakan "kekosongan kapasitas" sipil yang permanen.



Alat Otokratisasi: Mengikuti pola Venezuela & Filipina, militer berisiko menjadi "kaki tangan" eksekutif untuk melanggengkan kekuasaan dan membatasi oposisi.



Risiko Eskalasi Konflik: Pengerahan militer di "zona abu-abu" (masa damai) tanpa kontrol sipil ketat berpotensi memicu eskalasi konflik yang tidak perlu.

B. Rekomendasi Kebijakan (The Way Out)



Penguatan Institusi Sipil: Prioritaskan kapasitas parlemen dan birokrasi agar tidak bergantung pada "jalan pintas" militer.



Pembatasan Peran (Revisi Regulasi): Tegaskan batas peran militer hanya pada pertahanan eksternal; peran non-tradisional (OMSP) harus dibatasi pada kondisi darurat ekstrem.



Pengawasan & Reformasi: Parlemen dan masyarakat sipil wajib mengawasi anggaran dan kebijakan militer, serta mendorong reformasi internal TNI yang patuh pada konstitusi.

TERIMA KASIH